

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi, mengharuskan adanya bentuk keterwakilan dalam sistem pemerintahan melalui partai politik. Keterlibatan partai politik di Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem politik yang diterapkan dalam membawa kepentingan rakyat. Partai politik bisa dikatakan sebagai bentuk keterwakilan rakyat ke dalam pemerintahan. Partai politik pada hakikatnya menjadi elemen penggerak sistem politik, sekaligus alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, dengan mewakili kepentingan tertentu, memobilisasi masyarakat, dan melakukan kaderisasi demi melahirkan pimpinan (Hidayat, 2016).

Pemahaman mengenai partai politik sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 mengenai Perubahan atas UU. No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Peran dari partai politik bisa dilihat dan dirasakan secara nyata selama masa pemilihan umum (Nano Tresna, 2017).

Pemilihan umum yang dapat diikuti oleh partai politik memiliki peraturan hukum yang jelas dan telah tercantum dalam UU. No. 15 Tahun 2011 tentang Pemilu tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat perubahan dari ketiga undang-undang tersebut di dalam UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan pemilihan presiden

pada tahun 2014 hanya bisa diikuti oleh dua pasangan calon saja yang menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar pasangan. Dalam pemilu 2014 hingga pemilu 2019 yang diikuti oleh beberapa partai politik, terdapat dua partai politik yang menjadi sorotan karena keterwakilan pasangannya yaitu Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai Gerindra (Gunawan Siswantoro, 2015).

Demokrasi di Indonesia sejak pemilu 1999 membuat partai politik yang ada terbagi menjadi partai oposisi dan koalisi dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan demokratis, sehingga masih terdapat pihak yang akan mengkritisi kebijakan yang dibuat pemerintah agar tidak terulang kembali pemerintahan yang otoriter seperti masa orde baru. Sistem demokrasi membuat partai oposisi dan koalisi yang terbangun dengan tujuan sebagai penyeimbang sistem demokrasi yang diterapkan, agar tetap ada pihak yang mendukung pemerintah dan mengkritisi jalannya pemerintahan seperti halnya keberadaan partai Gerindra selama menjadi partai oposisi dianggap memiliki kinerja yang baik dalam mengkritik pemerintah disaat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyatnya (Munadi, 2019).

Pasca pemilihan umum 2009, pemilu tidak lagi mewujudkan sistem politik yang demokratis sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan oleh partai-partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum seperti partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan partai Golkar (Golongan Karya) kemudian merubah sikapnya menjadi berkoalisi dengan pemerintah. Hal ini menjadi bukti bahwa pada dasarnya sangat sulit mempertahankan barisan oposisi untuk mewujudkan demokrasi. Budaya oposisi sendiri untuk masyarakat di Indonesia masih dianggap sangat asing, sehingga masyarakat Indonesia menganggap dan menafsirkan budaya oposisi ini sebagai perlawanan dari sistem politik yang diterapkan. Pemerintahan yang demokrasi dicirikan mempunyai kebebasan yang dapat menerima kritikan, terbuka dan perlu transparan dari pihak yang berada dilur pemerintahan (Munadi, 2019).

Dalam wacana politik yang secara tidak langsung faktanya, sistem oposisi dipandang melalui dua aspek yang mempengaruhinya, yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Dalam aspek kultural, oposisi sudah menjadi sebuah kebutuhan

yang dibutuhkan oleh negara dalam membangun bangsa jauh lebih baik. Dalam aspek ini sudah siap untuk melakukan banding bukan hanya menyaksikan dalam dialog, kampanye, dan kegiatan politik lainnya. Contohnya di Indonesia berdasarkan aspek kultural oposisi sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya pemerintahan yang otoriter seperti pada masa orde baru agar kepentingan rakyat bisa didengar oleh pemerintah bukan hanya kepentingan para elit saja, sehingga partai oposisi bisa melakukan banding disaat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang tidak sejalan dengan kepentingan rakyatnya. Disatu sisi dalam aspek struktural, oposisi lebih diartikan dengan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, biasanya melakukan penolakan secara tegas sesuai dengan norma. Untuk kebijakan selanjutnya hanya tinggal menunggu perkembangan yang akan berlaku. Perilaku oposisi bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun sebagai wujud dari negara yang demokratis berlandaskan aturan yang berlaku, contohnya partai Gerindra yang menolak kenaikan harga BBM dan impor beras pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Damanhuri, 2009).

Disisi lain pemahaman mengenai partai koalisi dalam sistem demokrasi yaitu sebagai sebuah kelompok yang akan dibuat oleh para elit politik karena adanya kesepakatan dengan tujuan pembagian bangku kementerian diantara partai-partai yang berkoalisi. Sistem koalisi memiliki arena masing-masing yang membuat terjadinya sebuah koalisi antara partai politik. Pertama, koalisi bisa terbentuk pada arena pemilu dengan tujuan memenangkan pemilu, biasanya partai politik akan bekerja sama secara sukarela dengan alasan persamaan ideologi maupun program partai. Jadi bisa dikatakan partai politik yang saling berkoalisi bisa melakukan kampanye secara bersama-sama (Pratama H. M., 2020).

Kedua, koalisi di arena pemerintahan dengan alasan akan menjalankan pemerintahan dengan bersama-sama. Pada arena ini sistem pemerintahan dan sistem kepartaian sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah koalisi. Ketiga, koalisi juga bisa terbentuk karena adanya proses pembuatan sebuah kebijakan tertentu yang diinginkan antara partai politik yang berkoalisi. Pada arena ini biasanya hanya bersifat sementara dimana jika sebuah kebijakan sudah terbentuk maka koalisi antara partai-partai akan dibubarkan (Pratama H. M., 2020).

Terdapat faktor yang mempengaruhi pelebagaan koalisi dalam sistem presidensial secara mayoritas. Sistem presidensial mayoritas yaitu adanya keterpisahan antara eksekutif dan legislatif. Pertama, adanya desain konstitusi. Kedua, terlepas dari adanya kekurangan desain konstitusi nyatanya sistem multipartai juga sangat mempengaruhi terbentuknya koalisi dalam sistem presidensial. Ketiga, terdapatnya kelemahan dalam basis ideologi partai politik semakin membuat koalisi kepartaian bersifat pragmatis, sehingga terdapat konsep koalisi kepartaian dalam sistem pemerintahan (Rishan, 2020).

Koalisi partai politik mulai berubah sejak pemilu 2009, dimana terdapat perubahan persyaratan dalam undang-undang pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut terdapat penetapan syarat pasangan calon yang bisa diajukan oleh partai politik harus memperoleh kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit 20% atau sekitar 112 kursi (Dewantara Rudy, 2016). Persyaratan ini membuat partai politik saling bekerja sama untuk membentuk pemerintah koalisi. Partai politik harus berkoalisi dengan partai lainnya agar bisa mengusulkan calon pasangan yang ingin mereka ajukan dalam ajang pemilu. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia mendorong para partai politik untuk saling berkoalisi tanpa batasan yang jelas. Fenomena pasca pemilihan umum 2009 dan 2014 menunjukkan terjadinya krisis identitas dan kaburnya ideologi partai-partai di Indonesia, sehingga membuat partai politik dengan mudahnya merubah sikap mereka dari oposisi menjadi koalisi pasca masa pemilu (Dewantara Rudy, 2016).

Contohnya dalam pemilu 2014, peraturan undang-undang membuat pemilu yang diselenggarakan hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, hal ini tentu saja membuat partai-partai yang berkoalisi semakin jelas terlihat. Partai-partai yang ada terbagi menjadi dua kubu sesuai dengan pasangan calon yang diusung dalam pemilu, sehingga koalisi yang terbentuk hanya sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilu. Keadaan yang seperti ini, akan membuat partai-partai membentuk dua kelompok besar. Kelompok koalisi pertama dinamakan sebagai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung pasangan Jokowi, sedangkan pasangan Prabowo memiliki kelompok koalisi yang dinamakan Koalisi Merah Putih (KMP). Secara lebih spesifik terdapat dua partai politik besar yang

menjadi sorotan sebagai pengusung calon presiden, yaitu Jokowi yang diusung oleh partai PDIP sedangkan Prabowo diusung oleh partai Gerindra (Gunawan Siswantoro, 2015).

Partai Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo menjadi perhatian dari dunia politik maupun masyarakat sejak partai ini terbentuk pada tahun 2008, partai Gerindra sejak terbentuk berhasil dengan mudahnya masuk dalam ke dalam parlemen. Partai Gerindra lolos melalui persyaratan *parliamentary threshold* dengan keberhasilannya dalam memperoleh basis suara sebesar 6%. Partai-partai yang ada sangat sulit menembus parlemen, apalagi partai-partai yang baru terbentuk (Fathurrahman, 2018).

Pada pemilu 2009 partai Gerindra memilih berkoalisi dengan PDIP dengan mengusung pasangan calon Megawati dan Prabowo dengan hasil akhir Partai Gerindra kalah melawan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Pada pemilu 2014, partai PDIP tidak lagi berkoalisi dengan Gerindra namun malah mengajukan calon sendiri yaitu Jokowi, sedangkan Gerindra masih mengajukan calon yang sama yaitu Prabowo. Kedua partai ini menjadi saingan yang cukup ketat satu sama lain (Fathurrahman, 2018).

Dalam pemilu 2014 dan 2019, situasi pada saat itu membuat partai Gerindra lebih mengutamakan tujuannya dalam memenangkan pertarungan politik untuk menjadikan Prabowo sebagai Presiden, partai Gerindra berupaya mendirikan koalisi yang kuat untuk mengalahkan koalisi pemerintahan, dan partai Gerindra juga berupaya menghilangkan sistem *presidensial threshold* dengan alasan bisa merusak demokrasi. Hal ini berbeda dengan situasi partai Gerindra pada pemilu 2009, dimana partai Gerindra hanya terfokus bagaimana partainya bisa diterima oleh masyarakat luas dalam pertarungan nasional sebagai partai politik baru. Berakhirnya masa pemilu 2014 dengan kemenangan Jokowi dan PDIP dengan perolehan suara yang beda tipis, hasil yang sama juga diperoleh pada pemilu 2019. Hal ini membuat partai Gerindra terus berada dalam barisan oposisi dari pemerintahan Jokowi (Fathurrahman, 2018).

Berakhirnya pemilu 2019 dengan hasil kekalahan untuk partai Gerindra, melakukan pergerakan politik dimana hal tersebut ini mulai terlihat sejak Prabowo sering bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden. Dalam pertemuan Prabowo

menegaskan bahwa partainya siap membantu Jokowi dalam membangun perekonomian Indonesia jauh lebih baik dan meningkat. Berita mengenai partai Gerindra yang ingin masuk dalam koalisi Jokowi tentu saja memperoleh banyak respon dalam masyarakat namun Partai Gerindra sudah memastikan diri untuk bergabung dengan partai koalisi Presiden Jokowi dengan terpilihnya dua anggota partai tersebut untuk bergabung ke pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Jatah menteri bagi Gerindra adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Tobing, 2019)

Partai Gerindra menjadi partai politik yang masuk dalam kategori pola pergeseran *positioning* ekstremis dengan artian partai yang melakukan pergerakan atau pergeseran *positioning* ideologinya dengan ekstrem ke tengah atau berubah bentuk menjadi *catch-all party*. Partai dengan pola ini melakukan reduksi (pengenduran) atas ideologi partainya sendiri. *Positioning* ideologi partai-partai tidak jelas alias kabur. Dalam pembentukan koalisi, partai-partai berkoalisi dengan tanpa batas meskipun memiliki ideologi yang berbeda, Partai Gerindra mulai masuk dalam koalisi Jokowi setelah masa pemilihan umum 2019 meskipun terdapat perbedaan ideologi. Perpindahan menjadi koalisi tentu saja menyebabkan partai koalisi pemerintahan Jokowi menjadi gemuk. (Mayrudin, 2017)

Bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi Jokowi usai pemilihan umum 2019 pada masa kampanye sedang berlangsung diantara dua pasangan calon tersebut. Kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pipres) 2019 lalu berlangsung memanas, dan penuh dengan intrik. Strategi politik kotor dan kampanye hitam mewarnai ajang kampanye lima tahunan tersebut. Saling serang narasi dan opini yang ditambahkan dengan berita palsu, fitnah, ujaran kebencian, dan eksploitasi politik identitas hampir setiap hari terjadi di ruang publik selama masa kampanye berlangsung. Saling serang opini dengan model komunikasi politik yang tidak sehat tidak hanya terjadi di kalangan elite politik (Nurrochman, 2019).

Pada level bawah, masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar yang saling berhadapan. Sentimen identitas, terutama keagamaan dieksploitasi habis-habisan oleh kedua kubu pendukung calon presiden. Puncaknya ialah terciptanya polarisasi politik di masyarakat. Hal ini memberikan kesadaran bahwa wajah politik

yang serba dinamis dan tidak pasti terjadi pada masa pemerintahan periode 2019-2024 saat Partai Gerindra bergabung dalam koalisi Jokowi (Nurrochman, 2019).

Fakta-fakta menarik yang dapat dilihat setelah masa pemilihan umum 2019 yaitu pindahnya Partai Gerindra dari barisan oposisi ke pemerintahan menjadi salah satu contoh kasus bahwa pemilu di Indonesia memang belum dirancang untuk membentuk oposisi yang berbobot, berkomitmen terhadap esensi demokrasi dengan membatasi perilaku oportunistis-pragmatis partai. Pemilu di Indonesia masih sebagai sarana prosedural tanpa menyentuh substansi. Fenomena semacam itu nyatanya tidak terjadi sekali-dua kali saja dalam perjalanan pengalaman pemilihan umum yang terjadi di Indonesia (Romli, 2011).

Sepanjang berlangsungnya ajang pemilu sejak era reformasi, partai politik selalu silih berganti bongkar pasang komposisi koalisi sebelum atau sesudah pemilihan umum. Contohnya pada pemilihan umum tahun 2014 partai politik Golkar, PAN dan PPP, yang sebelum pemilihan berada di seberang barisan koalisi Jokowi, tiba-tiba berubah posisi pasca pemilihan. Perilaku ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi sebab koalisi partai tidak lagi berjalan dengan didasarkan pada ideologi dan platform, atau minimal kesamaan kebijakan yang mengikat komitmen mereka, namun berdasarkan asas untung-rugi kekuasaan (Romli, 2011).

Untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang diterapkan diperlukan partai politik yang berada dalam barisan oposisi. Contohnya partai Gerindra dan kubu koalisinya sebagai kekuatan oposisi dari pemerintahan sejak pemilu 2009 diharapkan bisa terus berada diluar barisan pemerintahan agar sistem demokrasi yang diterapkan bisa berjalan seimbang dan stabil dengan adanya pihak yang akan tetap mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kinerja partai Gerindra selama menjadi barisan oposisi bisa dikatakan cukup berani dan tegas dalam mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Noor, 2016).

Keberadaan oposisi sendiri dalam sistem demokrasi dianggap sangat penting, hal ini dikarenakan fungsi dari oposisi sendiri yaitu pertama sebagai penyeimbangan kekuasaan, sehingga pemerintah sendiri tidak akan terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyatnya. Kedua, oposisi akan membuat adanya alternatif kebijakan yang bisa menjadi penyempurnaan dari kebijakan yang telah dibuat, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang tercipta saat pembuatan kebijakan.

Ketiga, oposisi menjadi stimulus untuk persaingan sehat di antara elit politik dan pemerintah yang nantinya dengan adanya oposisi dapat menjaga pemerintah yang berkuasa dan memberikan kebijakan yang lebih baik karena adanya pihak lain yang bisa menawarkan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan masyarakat (Noor, 2016).

Perubahan partai politik yang tidak konsisten menjadi barisan oposisi menjadi suatu fenomena yang memang sudah sering terjadi di Indonesia sejak berakhirnya masa pemilu tahun 2009. Berakhirnya masa pemilu, partai politik berada di barisan oposisi memilih untuk merubah posisinya menjadi berkoalisi dengan pemerintahan setelah kalah dalam ajang pemilu, salah satunya yaitu partai Gerindra. Perubahan sikap yang dilakukan oleh partai Gerindra tentu menimbulkan tanda tanya untuk masyarakat apalagi partai Gerindra sendiri terkenal menjadi partai oposisi yang kuat dalam mengkritisi pemerintahan. Situasi seperti ini jika terus terjadi tentu saja akan menyebabkan kekuatan pemerintah akan semakin besar tanpa adanya penyeimbang, sehingga hal ini tidak dapat dipungkiri akan menciptakan pemerintahan yang korup. Koalisi gemuk dalam sistem pemerintahan akan berdampak kepada pemerintahan yang mudah terperosok ke dalam rezim yang otoriter, tanpa adanya oposisi membuat politik akan pincang, tidak ada lagi pengawasan dan keseimbangan, sehingga pemerintahan bisa kehilangan arah jika hanya mengandalkan barisan koalisi (Rishan, 2020).

Penelitian ini memerlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai tolak ukur dalam mendalami penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa karya ilmiah yang bertema sama untuk memperdalam topik penelitian. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk pedoman dalam melakukan penelitian supaya penelitian tersebut bisa berjalan dengan efektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel, dan media online lainnya. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa jurnal untuk memberitahukan kepada pembaca tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya berkesinambungan dengan penelitian penulis dan menghubungkan beberapa literatur yang telah dibuat. Berikut ini berapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan partai politik:

Eva Faturjannah, 2023

ANALISIS PERUBAHAN SIKAP PARTAI POLITIK GERINDRA DARI PARTAI OPOSISI MENJADI PARTAI KOALISI PASCA MASA PEMILU 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian pertama, yang berjudul “*Motivations To Form A Majority Coalition Of Candidates Machfud Arifin And Mujiman In The Surabaya City Election In 2020*” oleh Moh. Ainul Yaqin tahun 2021, dalam Jurnal Politik Islam, Universitas Indonesia. Jurnal keempat ini lebih membahas mengenai proses pembentukan koalisi partai politik yang terjadi pada masa pilkada untuk pasangan Machfud Arifin dan Mujimin. Proses pembentukan koalisi didasari dengan alasan ingin menumbangkan kepemimpinan partai PDIP di Surabaya, sehingga delapan partai politik lainnya yaitu Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PKS, PPP, Golkar dan Demokrat saling bekerja sama untuk mencalonkan pasangan lain yang dapat mengalahkan kekuasaan PDIP di Surabaya. Pembentukan koalisi ini bukan berdasarkan ideologi ataupun historis, pola pembentukan koalisi disini lebih terlihat kearah pragmatis. Partai politik yang ada saling berkoalisi untuk memperoleh kekuasaan dan mendapatkan dukungan suara di tingkat DPRD. Machfud Arifin dipilih karena partai-partai merasa figurnya bisa mewakili kepentingan politik partai, maka yang terjadi adalah terbentuknya koalisi besar agar peluang kemenangan bisa diraih. Selain memiliki potensi kemenangan yang lebih besar, partai politik lain juga akan tertarik untuk berkoalisi dengan partai yang memiliki basis massa atau jumlah pemilih yang besar, sehingga dapat mewujudkan Grand Coalition yaitu koalisi besar yang terdiri dari beberapa partai politik pemenang (Yaqin, 2021).

Penelitian kedua yang berjudul “Alasan Penolakan Partai Gerindra Terhadap *Presidential Threshold 20%* dan Kepentingan Politik Jangka Pendek Dalam Sistem multipartai” oleh M. Iqbal Fathurrahman tahun 2018, dalam Jurnal Universitas Brawijaya. Dalam jurnal pertama ini lebih membahas mengenai sistem multipartai dalam perpolitikan di Indonesia yang dikaitkan dengan partai Gerindra. Sistem multipartai yang diterapkan bisa dikatakan sangat kompleks dimana hal tersebut menyangkut mengenai ideologi partai politik hingga terdapat kepentingan politik dalam pembuatan suatu kebijakan. Jurnal ini menekankan kepada sikap Gerindra sebagai partai politik baru berubah antara pemilu 2009 dan 2014 dan pemilu 2019. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi Gerindra dalam struktur persaingan politik, dimana Gerindra merupakan oposisi dari pemerintah.

Penolakan Gerindra terhadap ambang batas 20% presiden hanya melayani kepentingan politik. Multi-partai mengandalkan kepentingan politik jangka pendek. Tentu saja, jika Gerindra sudah menyiapkan posisi politik jangka panjang, seharusnya Gerindra sejak awal menolak ambang batas presiden. Penolakan ini juga merupakan bentuk keberlangsungan politik Gerindra. Salah satu partai politik terkuat saat ini, tentu saja partai ini berperan dalam membentuk opini pemilih. Bagi Gerindra, menolak ambang batas presiden adalah bentuk kelangsungan politik untuk mempertahankan posisinya sebagai oposisi utama. (Fathurrahman, 2018)

Penelitian ketiga dengan judul “Legitimasi Partai Politik Gerindra: Modal dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen” oleh Nico Oktario Adytyas, Isneningtyas Yulianti, I Gusti Agung Ayu Kade Galuh tahun 2018, dalam Jurnal Radenfatah. Jurnal ini menjelaskan mengenai partai Gerindra sebagai salah satu partai baru langsung mencuri perhatian masyarakat dan mendapatkan suara yang cukup signifikan pada pemilihan umum tahun 2014. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai partai Gerindra menjadi simbol untuk Prabowo Subianto sangat kuat dalam partai tersebut, sehingga partai Gerindra dianggap memang berdiri untuk Prabowo. Prabowo diperlakukan sebagai tokoh yang harus dimenangkan sebagai presiden 2014 maupun presiden 2019. Dukungan untuk Prabowo menjadi hal yang wajib untuk pengurus partai Gerindra.

Kaderisasi dan perekrutan yang ada di Partai Gerindra juga melihat sosok Prabowo sebagai alasan kuat bagi mereka untuk masuk ke Partai. Modal simbolik berperan sangat kuat dalam kemenangan Partai Gerindra. Dominasi simbol Prabowo sangat nyata dan telah menghegemoni. Simbol Prabowo berhasil menarik massa untuk bergabung atau bersimpati, sehingga memilih partai. Dominasi simbol cenderung menjadi alat kekuasaan partai. Jurnal ini lebih memfokuskan bagaimana partai Gerindra bekerja dalam masyarakat dengan menggunakan Teori Modal Sosial Budaya (*Social Cultural Capital*) milik Pierre Bourdieu. Fokus Bourdieu adalah melihat bagaimana masyarakat (*society*) itu direproduksi serta bagaimana kelas dominan mempertahankan posisinya (Nico Oktario Adytyas, 2018).

Penelitian keempat dengan judul “Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai peserta Pemilu 2014” oleh Yeby Ma’asan Mayrudin tahun 2017, Universitas 17 Agustus

1945 Jakarta. Jurnal kedua ini menjelaskan mengenai pergeseran-pergeseran ideologi yang terjadi pada partai politik dalam pemilihan umum 2014, dimana partai politik sudah tidak berpegang teguh kepada ideologi nya dalam menjalankan tugasnya. Kebanyakan partai politik lebih memfokuskan diri dalam memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimum, dimana kebanyakan partai berubah menjadi bentuk *catch-all party* yang menawarkan suatu program dan kebijakan umum, bukan menawarkan persoalan ideologis karena masyarakat dianggap semakin modern. Hal ini secara fundamental mengubah posisi dan fungsi partai-partai dan menghilangkan ketegangan antara kiri dan kanan. Partai gerindra masuk ke dalam pola ekstremis dimana partai melakukan pergeseran positioning ideologi yang begitu tajam. Dalam jurnal ini tak hanya membahas mengenai ideologi partai Gerindra namun juga ideologi partai-partai besar lain nya seperti ideologi Pancasila yang berdiri pada garis ideologis Nasionalis-Sekuler, seperti PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Nasdem dan PKPI. Partai berasas/ideologikan Islam, seperti PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN. Partai berlandaskan pada ideologi Nasionalis-Religius, yang berdiri pada posisi tengah atau *catch-all party*, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura (Mayrudin, 2017).

Penelitian kelima, yang berjudul “Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia” oleh Dedi Zulkarnain Pratama tahun 2015 dalam jurnal *Transformative*. Pada jurnal ke-5 ini lebih menekankan pembahasannya mengenai fenomena partai politik koalisi dan oposisi dalam sistem kepartaian di Indonesia itu sendiri. Fenomena partai politik koalisi memang tidak dapat dipisahkan dengan partai oposisi, dimana mereka hadir untuk mengkritik kebijakan pemerintah demi mendapatkan perhatian publik. Adanya fenomena semacam ini bisa dikatakan sebagai koalisi semu. Koalisi semu yaitu sebuah istilah baru yang digunakan dalam menggambarkan adanya fenomena politik yang sering terjadi di masa sekarang ini. Gagasan mengenai koalisi semu ini diakibatkan karena semakin terpuruknya sistem kepartaian yang ada di Indonesia, dimana berbagai penerapan koalisi semu ini lebih banyak memberikan dampak negatif, sehingga dapat merusak sistem kepartaian di Indonesia. Jurnal ini diharapkan bisa memberikan sebuah pembelajaran dalam memperbaiki sistem kepartaian yang ada. Pada kenyataannya koalisi semu ini justru bisa menjadi senjata yang merusak sistem kepartaian di Indonesia karena rakyat

akan menjadi korban dari kepentingan para elit politik dan konflik elit-elit politik yang dijadikan legitimasi untuk menggerakkan partai politik (Pratama D, 2015).

Penelitian keenam, yang berjudul “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia” oleh Munadi tahun 2019 dalam Jurnal Resolusi, Universitas Sains Al-Qur’an. Jurnal keenam ini menekankan pembahasannya mengenai posisi oposisi dan koalisi dalam sistem demokrasi, dimana sistem demokrasi membuat oposisi dan koalisi menjadi eksis. Oposisi hadir untuk memperbaiki dan mengkritisi keputusan pemerintah, sedangkan koalisi hadir sebagai pemegang kekuasaan yang mendukung pemerintah yang menjabat. Pada dasarnya partai oposisi dan koalisi menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan sistem pemerintahan di Indonesia yang demokratis. Dalam gambaran politik demokrasi terdapat peran oposisi sebagai pemegang kekuasaan dimana demokrasi oposisi bisa mengkritisi keputusan pemerintah, sehingga perlunya pembinaan kerjasama dengan koalisi partai politik supaya pemerintah bisa menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan mendapatkan legitimasi yang sesuai dengan undang-undang. Pada realitanya politik sulit untuk memilih antara oposisi dan koalisi makanya dalam sistem demokrasi akan selalu ditemui adanya koalisi dan oposisi pada dinamika perpolitikan, sehingga dalam artikel ini mengatakan bahwa demokrasi dalam elit politik akan cenderung menghasilkan demokrasi yang semu (Munadi, 2019).

Penelitian ketujuh, yang berjudul “Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” oleh Ahmad Siboy tahun 2021 dalam Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISOP). Pada jurnal ketujuh ini membahas mengenai koalisi partai dalam sistem pemerintahan di Indonesia dimana adanya perubahan pola partai koalisi yang terus terjadi menjelang pemilihan umum dapat dikatakan bahwa koalisi partai politik ada berdasarkan kepentingan pragmatis. Hal tersebut membuat adanya ketidakjelasan status partai politik yang berperan sebagai partai oposisi yang ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Hasil dari penelitian ini yaitu perlunya sebuah koalisi permanen yang dibutuhkan untuk menguatkan pola koalisi partai politik, sehingga bisa menunjang sistem pemerintahan Indonesia. Terdapat sebuah desain koalisi permanen melalui model dua kutub yang membagi dalam dua kelompok yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Adanya pembagian dua kutub ini, diharapkan bisa bersifat seimbang antara kekuatan koalisi

dengan kekuatan oposisi. Desain lain yang bisa ditempuh yaitu pola koalisi partai yang dibentuk karena persamaan mazhab maupun aliran partai politik (Siboy, 2021).

Penelitian kedelapan, yang berjudul “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia” oleh Firman Noor tahun 2016 dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal kedelapan ini lebih membahas mengenai hakikat keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi, dimana oposisi bukan hanya diartikan sebatas sikap yang melawan pemerintah namun oposisi merupakan kelompok yang ada di luar pemerintah yang mampu memiliki kontrol yang tegas dan mengusulkan sebuah alternatif dalam kebijakan. Oposisi yang ada di Indonesia berawal dari kalangan kelompok elit, orang-orang cerdas serta orang-orang yang memahami politik modern yang memahami mengenai oposisi, sehingga semakin banyak rakyat Indonesia sadar akan politik bangsa. Kesadaran mengenai oposisi itu semakin meningkat, sehingga di beberapa orang hal ini menjadi meresahkan. Keberadaan oposisi di Indonesia belum bisa dikatakan solid karena pada kenyataannya beberapa partai politik dengan mudahnya berubah sikap dari oposisi menjadi koalisi sama halnya dengan partai Gerindra. Penelitian ini melihat bahwa realitas keberadaan oposisi pada sistem politik di Indonesia sangat penting dalam penguatan demokrasi, dan terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan oposisi dalam sistem politik (Noor, 2016).

Penelitian kesembilan, yang berjudul “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia” oleh Idul Rishan tahun 2020, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian kesepuluh ini membahas mengenai resiko adanya koalisi yang berlebih dalam sistem presidensial. Alasan yang menjadi latar belakang mengapa koalisi yang ada pada sistem presidensial di Indonesia memiliki muatan yang berlebih yaitu karena adanya hasil dari perubahan undang-undang, adanya dampak dari multipartai yang ekstrim di Indonesia, dan basis ideologi partai politik bisa dikatakan lemah dengan adanya hal tersebut, membuat resiko yang ditimbulkan berupa pemerintahan yang memiliki sifat tidak stabil dan mudah tergoda dengan kepemimpinan otoriter. Pada penelitian ini menawarkan sebuah solusi berupa penyederhanaan partai politik yang

ada supaya dapat merapikan hubungan antara eksekutif dengan legislatif melalui beberapa tawaran dan konsekuensi dengan tujuan membangun sistem kepartaian yang relevan dengan sistem presidensial di Indonesia (Rishan, 2020).

Penelitian kesepuluh, yang berjudul “Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi” oleh Muhammad Yusrizal Adi Syaputra tahun 2017, dalam jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Universitas Medan Area. Jurnal kesepuluh ini menekankan pembahasan mengenai kedudukan partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai penentu pencalonan pemimpin pemerintahan di Indonesia. Partai politik sendiri memiliki peranan yang cukup sentral dan kuat dalam menentukan kabinet pemerintahan presidensial Indonesia, sehingga dapat menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh presiden yang terpilih dari ajang pemilu. Berdasarkan penelitian ini melihat bahwa mekanisme *parliamentary threshold* bisa menjadi alat pembatasan partai politik dalam penguatan Lembaga presidensial dengan sistem multi partai. Sistem *parliamentary threshold* diharapkan bisa memberikan kestabilan dalam politik presiden sebagai kepala pemerintahan tanpa takut dibayangi oleh intervensi partai politik koalisi maupun partai politik oposisi. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 terkait syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar konstitusi yang menyebutkan bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden berdasarkan koalisi partai politik pendukung pemerintahan pada saat itu. (Adi Syaputra, 2020)

Dalam sepuluh jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa jurnal pertama hingga jurnal ketiga membahas mengenai perjalanan partai Gerindra dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Baik selama masa pemilihan umum sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Dalam ketiga jurnal ini juga membahas mengenai posisi partai Gerindra selama menjadi partai oposisi dalam pemerintahan, sedangkan dalam ketujuh jurnal lainnya lebih menekankan pembahasannya mengenai koalisi dan oposisi partai-partai di Indonesia yang dikaitkan dengan sistem demokrasi. Pengaruh dari oposisi dan koalisi sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem demokrasi yang ada. Jurnal lain membahas mengenai koalisi gemuk yang akan berakibat membuat pemerintah menjadi lemah karena kurangnya pihak yang akan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Eva Faturjannah, 2023

ANALISIS PERUBAHAN SIKAP PARTAI POLITIK GERINDRA DARI PARTAI OPOSISI MENJADI PARTAI KOALISI PASCA MASA PEMILU 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dari sepuluh penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka, tidak ada jurnal yang meneliti mengenai perubahan sikap partai Gerindra yang bergabung dalam koalisi pemerintahan pada periode 2019-2024 setelah kalah dalam pemilihan umum 2019. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada gerak-gerik partai Gerindra dalam pemerintahan saat ini, dimana saat Partai Gerindra ingin bergabung menjadi partai koalisi banyak menimbulkan pro dan kontra baik dalam masyarakat maupun dari partai politik lainnya. Melihat apa yang menjadi alasan partai Gerindra berubah sikapnya dari oposisi menjadi koalisi padahal sebelumnya partai Gerindra menjadi partai politik yang sangat bertentangan dengan koalisi Jokowi pada masa pemilihan umum dari tahun 2014 hingga pemilihan umum tahun 2019. Adanya perubahan menjadi koalisi tentu saja ini akan berpengaruh terhadap komposisi dari oposisi yang ada, oleh sebab itu penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana komposisi antara koalisi dan oposisi setelah perubahan positioning partai Gerindra.

Dari penelitian diatas yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini oleh penulis, penulis menemukan celah bahwa tidak ada penelitian yang membahas secara lebih spesifik dan jelas mengenai perubahan sikap partai politik Gerindra pasca masa pemilu 2019, sehingga berangkat dari situasi ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai sikap partai Gerindra yang sebelumnya merupakan partai oposisi kemudian berubah menjadi partai koalisi dalam kabinet Jokowi setelah kalah untuk kedua kalinya dalam pemilihan umum. Dalam masa kampanye pemilihan umum 2019 baik partai Gerindra maupun partai koalisi Jokowi saling menyerang satu sama lain dengan begitu panasnya. Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini adalah **“Perubahan Sikap Partai Politik Gerindra Dari Partai Oposisi Menjadi Partai Koalisi Pasca Masa Pemilu 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan yaitu perubahan sikap yang dilakukan oleh partai Gerindra yang sebelumnya merupakan bagian dari partai oposisi kemudian berubah menjadi partai koalisi pasca pemilu 2019. Permasalahan ini tentu dapat merusak sistem demokrasi yang diterapkan karena sistem demokrasi tidak lagi berjalan dengan seimbang dan stabil akibat kurangnya partai politik yang

berada di barisan oposisi dari pemerintahan, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian penulis yaitu:

Bagaimana perubahan sikap partai politik Gerindra dari partai oposisi menjadi partai koalisi setelah masa pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui alasan perubahan sikap politik partai Gerindra yang berubah dari partai oposisi menjadi partai koalisi pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024 setelah kalah untuk kedua kalinya dalam pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, penulis dapat menambah serta memperdalam wawasan dan pengetahuannya mengenai ilmu politik.
 - 2) Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai partai politik Gerindra.
 - 3) Hasil penelitian ini untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Sarjana Satu pada jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
 - b. Bagi Pembaca
 - 1) Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai partai politik dan kepentingan partai.
 - 2) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan perbandingan pada penelitian dimasa sekarang hingga masa yang akan datang.
 - 3) Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang sikap partai gerindra pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang juga terdapat tinjauan pustaka, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematis penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan mengenai konsep penelitian yaitu konsep kepentingan politik, teori penelitian yang digunakan yaitu teori partai politik termasuk konsep tipologi partai politik dan teori pilihan rasional, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data serta tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai analisis data yang sudah di temukan di lapangan, sehingga akan sesuai dengan latar belakang yang telah dibuat. Data yang diperoleh oleh peneliti akan dibahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada, serta akan menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan dikaitkan dengan pandangan teoritis, sehingga akan menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan juga saran penelitian terkait pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian dalam proposal skripsi.